

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan sebuah daerah ataupun negara yang dapat ditinjau dengan angka dalam presentasi yang menggambarkan tingkatan suatu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara di satu waktu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Mengukur proses lajunya pertumbuhan ekonomi yaitu menggunakan PDRB. Ketersediaan faktor-faktor produksi dalam suatu negara digunakan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada konsep mikro dalam teori produksi, peningkatan jumlah output ditentukan oleh input input yang terlibat dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan, faktor produksi meliputi SDA, barang modal, tenaga kerja, dan keahlian.

Pada tingkat daerah, PDRB digunakan sebagai ukuran output dari pertambahan peningkatan faktor produksi. PDRB merupakan jumlah peningkatan dari seluruh kegiatan produksi pada perekonomian daerah yang dihitung atas dasar konsep arus barang. PDRB dihitung dengan menggunakan nilai produk yang diciptakan pada satu periode tertentu.

Menurut Dzakiyah (2021) yaitu tahun ke tahun secara keseluruhan perkembangan PDRB merupakan sebuah parameter dari pencapaian pembangunan regional yang dapat dikelompokkan di sektor ekonomi. Apabila masing-masing sektor ekonomi, yaitu: keuangan, perdagangan, pertanian, pengolahan, dan sector

lainnya memberikan sumbangan yang semakin besar kepada PDRB suatu daerah yang mampu memanasikan pertumbuhan ekonomi menjadi makin unggul (Etik Umiyati, 2014). Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui PDRB Harga Konstan karena PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan perkembangan barang dan jasa yang diukur dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

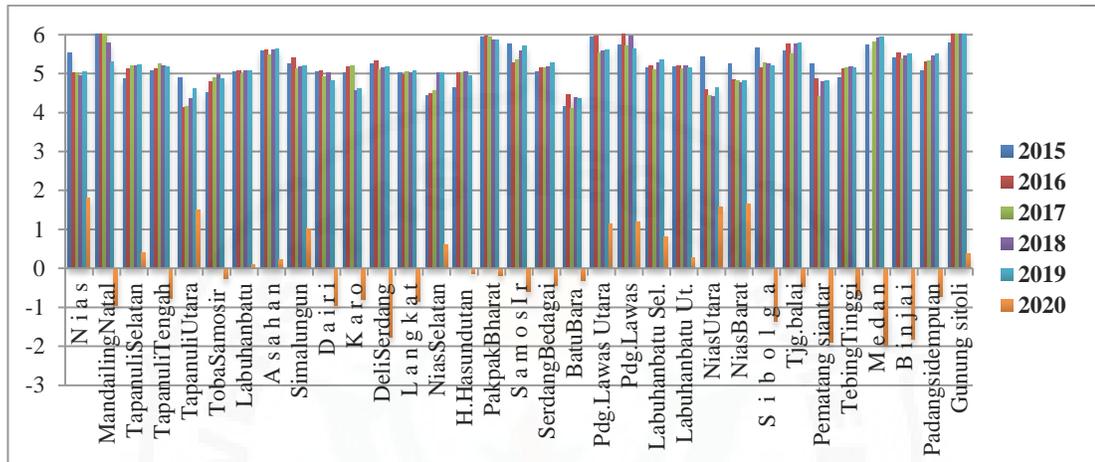
Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dalam pembangunan ekonomi karena pembangunan ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pembangunan ekonomi. Penetapan target laju pertumbuhan dilakukan oleh Pemerintah di dalam perencanaan yaitu dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Tabel 1.1 di bawah merupakan jumlah PDRB ADHK periode 2010 di Sumatera Utara tahun 2015-2020.

Table 1.1 PDRB Harga Konstan Sumatera Utara 2015-2020

Tahun	PDRB (milyar rupiah)	Perkembangan	Persentase
2015	440955.85	-	-
2016	467187.76	26,231.91	5.95
2017	491922.92	24,735.16	5.29
2018	512762.63	20,839.71	4.24
2019	539513.85	26,751.22	5.22
2020	533746.36	(5,767.49)	-1.07

Sumber : Data diolah (BPS SUMUT)

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten dan Kota



Sumber : Data diolah (SUDA 2015-2020)

Menurut data pada BPS Sumatera Utara, Pembangunan ekonomi yang berkepanjangan di Propinsi Sumatera Utara nyatanya telah memberikan pengembangan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yaitu apabila pertumbuhan ekonomi membaik maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan naik sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat daerah di Sumatera Utara.

Sjafrizal (2008) menjelaskan bahwa pertumbuhan wilayah mampu mencerminkan suatu pencapaian pembangunan di suatu wilayah tersebut, apabila wilayah tersebut dapat memberikan peningkatan terhadap laju pertumbuhan ekonominya, maka daerah tersebut disebut telah mampu melakukan pembangunan dengan maksimal.

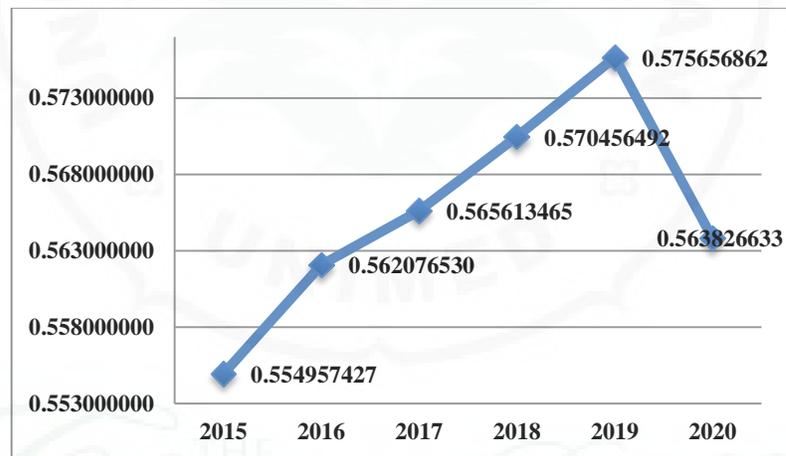
Pada gambar 1.1 di atas memperlihatkan bahwa adanya kecenderungan yang semakin memberikan peningkatannya dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Sumatera Utara mampu mendorong jumlah PDRB yang sebelumnya pada tahun 2005, yaitu sebesar 139.618,3 milyar rupiah, menjadi 440.955,85 milyar rupiah pada tahun 2015. Menurut gambar 1.1 yaitu pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan menggunakan kenaikan PDRB ADHK periode 2010 di Provinsi Sumatera Utara yaitu di tahun 2018 tumbuh 4.2% yaitu sebesar 512.762 milyar rupiah yang cenderung lebih meningkat dibanding pertumbuhan tahun 2017 yang meningkat sebesar 5.9% yaitu sebesar 491.922 milyar rupiah.

Adanya variasi PDRB pada setiap Kabupaten/Kota ini menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuhnya dilampaui pertumbuhan jumlah penduduk dapat menyebabkan adanya fenomena ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan daerah yang pertumbuhan penduduknya lebih tertata. Seperti yang dijelaskan oleh Gilang Risma Sulistyowati (2018), pada sejumlah negara miskin dan negara sedang berkembang, ketimpangan pendapatan adalah pokok persoalan di dalam proses pembangunan ekonomi.

Sumatera Utara adalah provinsi yang meliputi 33 kabupaten dan kota serta mempunyai kondisi perbedaan antarwilayah yang penyebarannya berbeda di setiap Kabupaten/Kota yaitu seperti terletak pada perbedaan watak dari sosial dan ekonomi bahkan SDA. Akibatnya yaitu adanya permasalahan pembangunan ekonomi, yakni ketidakmampuan dalam mengendalikan SDM dan SDA.

Daerah-daerah potensial dan lebih sejahtera dapat dilihat sebagai keuntungan kompartemen di dalam wilayah, namun di sisi lain adanya beberapa masalah ekonomi, seperti sumber daya manusia dan sumber daya modal yang sering dihadapkan oleh pengambil keputusan yang rendah di tingkat provinsi ataupun kabupaten dan kota. Dampaknya yaitu kondisi ekonomi dalam distribusi pendapatan tidak terpenuhi, dan tetap menggambarkan kesenjangan termasuk ketimpangan dalam pencapaian ekonomi antar kabupaten/kota (Yusuf, 2013).

Gambar 1.2 Grafik IW Ketimpangan Pembangunan Regional Provinsi Sumatera Utara 2015-2020



Sumber : Data diolah (BPS SUMUT)

Gambar 1.2 di atas memperlihatkan besaran Ketimpangan Pembangunan Regional di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2020. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015-2019 menunjukkan kenaikan. nilai IW pada tahun 2015 tercatat hanya sebesar 0.55 yang nilainya lebih kecil daripada tahun 2019 yang nilai ketimpangannya mencapai 0.57. Namun, atas

data pada tabel 1.2, nilai ketimpangan pembangunan regional Sumatera Utara menunjukkan penurunan pada tahun 2020, yaitu sebesar 0.56.

Data di atas pula menggambarkan bahwa kesenjangan pembangunan regional di Provinsi Sumatera Utara masih berada dalam kesenjangan tinggi dikarenakan nilai Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara masih berada di atas 0.5. Apabila kondisi disparitas ini cukup memprihatinkan, yaitu ketika nilai indeks semakin mendekati 1 ini akan menggambarkan nilai ketimpangan yang semakin melebar dan dapat memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Gabriel et al. (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pembangunan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonommi lebih dominan pada daerah maju daripada daerah berkembang. Kemudian, dapat menghasilkan dan meningkatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

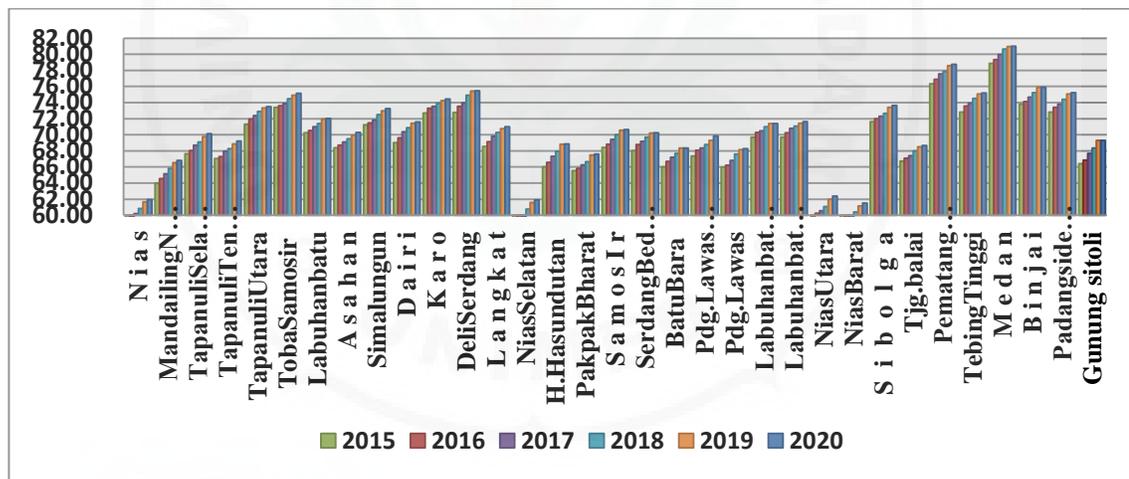
Perbedaan keadaan demografis dan sumber daya manusia pada suatu wilayah pula dapat berpengaruh terhadap kualitas SDM yang biasanya dihitung dengan IPM. Tingkat produktivitas penduduk dipengaruhi oleh naik atau turunnya IPM dan mampu memberikan pengaruh kepada pendapatan penduduk. Pada tabel 1.2 di bawah merupakan nilai IPM dan perkembangan pada tahun 2015-2020 di Sumatera Utara.

Table 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2020

Tahun	IPM	Perkembangan	Persentase
2015	69.51	-	-
2016	70.00	0.49	0.70
2017	70.57	0.57	0.81
2018	71.18	0.61	0.86
2019	71.74	0.56	0.79
2020	71.77	0.03	0.04

Sumber : BPS SUMUT (data diolah)

Gambar 1.3 Grafik IPM Sumatera Utara tahun 2015-2020



Sumber : BPS SUMUT (data diolah)

Menurut data di atas, nilai IPM yang tertinggi diantara tahun 2015 hingga tahun 2020, yaitu pada tahun 2020 sebesar 71,77. Kemudian yang menjadi nilai IPM terendah pada tahun 2015 hingga tahun 2020, yaitu pada tahun 2015 sebesar 60,51. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020 laju nilai IPM di Sumatera Utara mengalami kenaikan, namun kenyataannya beberapa daerah di Sumatera utara masih mempunyai

Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah bahkan nilai indeksnya jauh di bawah nilai indeks pada daerah lain di Provinsi Sumatera Utara.

Seperti pada tahun 2020, indeks IPM pada Kabupaten Nias Barat dan Nias menjadi kabupaten dengan nilai IPM terendah dibanding Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara. Padahal semakin besar nilai IPM di suatu daerah, maka akan mampu mendorong peningkatan produktivitas penduduk dan hal ini juga akan meningkatkan pendapatan penduduk. Namun, IPM berbeda di setiap wilayah, sehingga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Penelitian yang diteliti oleh Hidayat & Paidi (2015), menyatakan IPM berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi karena semakin menurun IPM, akan menurunkan tingkat viabilitas penduduk juga yang selanjutnya akan menurunkan daya produksi dan pendapatan, dan sebaliknya yaitu ketika nilai IPM meningkat maka akan meningkatkan aktifitas penduduk yang mampu meningkatkan peningkatan pendapatan.

Jika dipadankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada daerah lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2020 memiliki pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan cukup baik. Namun, keunggulan modal SDM atau IPM dan aktivitas ekonomi yang tinggi pada suatu daerah akan memungkinkan munculnya masalah pembangunan yang tidak merata. Sumatera Utara memiliki permasalahan yang didasari oleh permasalahan PDRB perkapita yang berbeda-beda yang menggambarkan terjadinya ketimpangan pendapatan antarwilayah di Sumatera Utara.

Menurut penjelasan di atas, masih adanya disparitas pembangunan regional dan tingkat mutu IPM di tiap wilayah yang menjadi pemicu pemerataan yang belum maksimal pada pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga, atas fenomena di atas, peneliti terdorong melaksanakan penelitian ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Regional dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”** untuk menganalisa seberapa jauh pengaruhnya ketimpangan pembangunan regional dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2015-2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Dapat diidentifikasi permasalahan dari latar belakang masalah di atas, yaitu :

1. Dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada wilayah lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2020 memiliki pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup baik.
2. Pengukuran dari pencapaian suatu pembangunan di Sumatera Utara dapat dihitung dengan pertumbuhan ekonomi dan turunnya kesenjangan antardaerah, antar penduduk, dan antar sektor.
3. Kualitas modal manusia atau IPM dan aktivitas ekonomi yang tinggi yang terjadi pada suatu daerah saja akan memungkinkan munculnya masalah pembangunan yang tidak merata di Sumatera Utara
4. Terdapat pendapatan per kapita yang berbeda-beda pada setiap daerah yang menunjukkan adanya ketimpangan regional di Sumatera Utara.

1.3 Batasan Masalah

Melalui identifikasi masalah di atas dan potensi peneliti untuk meneliti permasalahan secara keseluruhan. Maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan :

1. Ketimpangan pembangunan regional Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara 2015-2020.
2. IPM Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara 2015-2020.
3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara 2015-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka dirumuskan rumusan masalah, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pembangunan Regional terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pembangunan Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa pengaruh Ketimpangan Pembangunan Regional terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apa pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui apa pengaruh Ketimpangan Pembangunan Regional dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diinginkan yaitu dapat memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan, pemikiran, informasi, dan kepada pihak lain yang berkepentingan khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi pada bidang ekonomi pembangunan. Serta dijadikan acuan dan rujukan bagi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh ketimpangan pembangunan regional dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti berkaitan tentang teori ketimpangan pembangunan regional dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan, penelitian ini mampu dijadikan sebagai pertimbangan dan sumbangan wawasan bagi pemerintah daerah untuk mengecilkan ketimpangan pembangunan dan meningkatkan IPM.

